

Jurnal

Vol. I No. 2

Agustus 2011

ISSN 2089-9432

AKSI POLGAN **(Akuntansi Politeknik Ganesha Medan)**

STRATEGIC COST MANAGEMENT SUATU PERSPEKTIF
PERKEMBANGAN AKUNTANSI MANAJEMEN
Syharman

SIKLUS PEMBELIAN DAN PENJUALAN
PADA CV. X
Suya Hendra Putra & Darwan Tanady

PERANCANGAN PENJUALAN DAN PEMBAYARAN MOBIL BERBASIS
PADA SHOWROOM MOBIL R
Agus Candra Putra Sembiring & Diding Kusnady

SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU TERKOMPUTERISASI ✓
PT XYZ
William Chen & Nurdin

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN
INFORMASI AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH
Agus Susanto Tan

AUDIT SOSIAL DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP
(SEBUAH TINJAUAN TEORI : PERAN
STRATEGIS AKUNTAN)
Novien Rialdy



Diterbitkan oleh :

POLITEKNIK GANESHA MEDAN (POLGAN)

JL. VETERAN KOMPLEKS BRAYAN TRADE CENTER (BTC) NO. 40-41

TELP. 061-7760.1023 FAX. 061-844.0344 MEDAN HELVETIA 20383

EMAIL: jurnalminfopolgan@poltekganeshamedan.ac.id

Website: www.poltekganeshamedan.ac.id

JURNAL AKSI POLGAN
Vol. I No. 2 Agustus 2011

DAFTAR ISI

STRATEGIC COST MANAGEMENT SUATU PERSPEKTIF PERKEMBANGAN AKUNTANSI MANAJEMEN.....	1-13
<i>Syaharman</i>	
SIKLUS PEMBELIAN DAN PENJUALAN PADA CV X	14-30
<i>Suya Hendra Putra & Darwan Tanady</i>	
PERANCANGAN PENJUALAN DAN PEMBAYARAN MOBIL BERBASIS PADA SHOWROOM MOBIL R.....	31-55
<i>Agus Candra Putra Sembiring & Diding Kusnady</i>	
SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU TERKOMPUTERISASI PT XYZ	56-73
<i>Nurdin & William Chen</i>	
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH.....	74-94
<i>Agus Susanto Tan</i>	
AUDIT SOSIAL DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP (SEBUAH TINJAUAN TEORI : PERAN STRATEGIS AKUNTAN).....	95-109
<i>Novien Rialdy</i>	

**AUDIT SOSIAL DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP
(SEBUAH TINJAUAN TEORI : PERAN
STRATEGIS AKUNTAN)**

**Novien Rialdy
(Politeknik Ganesha Medan)**

Abstrak

Desakan yang semakin tinggi dari masyarakat agar perusahaan tidak menjadi entitas yang selfish, mendorong banyak perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Namun pada pelaksanaannya banyak aktivitas CSR yang bias. Akitivitas-aktivitas yang dilakukan seringkali hanya bagian kegiatan promosi produk atau perusahaan belaka.

Sementara itu perusahaan-perusahaan di Indonesia masih saja menghasilkan dampak negatif dari aktivitasnya, kasus lumpur panas PT Lampindo merupakan kasus lingkungan hidup terbesar dalam sejarah perkembangan perusahaan di Indonesia (kompas, 2/9)

Artikel ini ditujukan untuk mendiskusikan landasan teori pentingnya Audit sosial dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia sebagai peran penting strategis akuntan dan wujud kepedulian dari organisasi profesi ini

Kata kunci: Audit Sosial, isu lingkungan hidup dan Akuntan

LATAR BELAKANG

Praktek tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh korporasi besar, khususnya di sektor industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya), saat ini sedang disorot tajam, karena dampak negatif yang di timbulkannya, hal ini karena mulai tumbuhnya kesadaran akan lingkungan di akhir tahun 80 an (Kumalahadi, 2000)

Banyak kasus lingkungan hidup yang merugikan massyrakat dan negara terjadi di indonesia seperti: PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara , kasus PT.Freeport, Kasus teluk buyat, dan yang terakhir dan yang terbesar adalah kasus lumpur panas PT Lapindo merupakan contoh masih lemahnya kesadaran sosial perusahaan yang di wujutkan dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Secara teoritik perusahaan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) lahir dari sebuah kesadaran dimana perusahaan merupakan subsistem dari masyarakat dimana permasalahan yang ada dimasyarakat juga merupakan masalah perusahaan, karenanya perusahaan memiliki kewajiban atas apa yang terjadi di masyarakat. manajer, dalam hal ini dianggap memiliki talenta untuk itu, disamping perusahaan dalam operasionalnya menggunakan dana dari investor (*stockholder*) juga menggunakan sumber dana dari masyarakat serta menggunakan sumber-sumber alam yang juga merupakan milik masyarakat sehingga wajar jika masyarakat mempunyai harapan terhadap perusahaan. Dauman Dan Hargreaves (1992) membagi areal tanggungjawab perusahaan dalam tiga level:

Basic Responsibility

Pada level pertama, menghubungkan tanggungjawab yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, memuaskan pemegang saham. bila tanggungjawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius

Organizational Responsibility

Pada level kedua, ini menunjukkan tanggungjawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan "*stakeholder*" seperti pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat disekitarnya.

Societal Responses

Pada level ketiga, menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan individual dapat secara berkesinambungan terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

pada level *organizational responsibility* dan *societal responses* inilah penelitian dikonsentrasikan.

Isu lingkungan hidup menjadi perhatian banyak pihak karena lingkungan hidup dewasa ini menghadapi lima tantangan : (1) langkahnya sumber air bersih (2) degradasi kualitas tanah dan hutan, (3) merosotnya aneka hayati karena habitat lingkungan hidup tanaman dan hewan rusak , (4) Perubahan iklim dan suhu. (5) pesat pertumbuhan manusia (YB. Sigit Hutomo,1996).

Dari tantangan tersebut seperti pencemaran menjadi beban masyarakat (*social cost*) sedangkan perusahaan menikmati hasil dari dampak negatif atas produktivitasnya. Pola ekonomi lama yang tidak memperhitungkan struktur kalkulasi biaya eksternal mulai ditinggalkan dan dimungkinkan entitas akan memasukan faktor eksternal ke internalisasi perusahaan. Atau dengan kata lain profit oriented tidak sepenuhnya dipergunakan dan entitas mengarahkan paduan tujuan bisnis (*profit oriented*) dan aspek lingkungan agar mampu mengelola *enviromental risk* dan *opportunity*. Perubahan pola ini lebih mengarah pada strategi jangka panjang dan reputasi perusahaan dimasa depan. Sebagai contoh,PT.Aqua Golden Mississippi memelopori penggabungan strategi jangka panjang entitas dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dan hasilnya, dalam jangka pendek banyak menyedot biaya namun dalam jangka panjang profitabilitas tidak terganggu bahkan ada efek kemantapan terhadap *corporate performance* dan keunggulan komparatif.

Namun dalam dunia bisnis tidak seperti PT.Aqua Golden Mississippi dalam menanggapi isu lingkungan. Ragam sikap tanggapan manajemen atas hal tersebut yang dapat dibedakan reaktif, aktif, proaktif dan inovatif. Namun kebanyakan manajemen bersikap reaktif, manajemen akan peduli terhadap lingkungan bila mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Tentunya ketidak pedulian manajemen terhadap lingkungan akan membawa dampak seperti pencemaran.

Kesadaran masyarakat dari waktu ke waktu khususnya terhadap pencemaran lingkungan semakin tinggi. Ini terbukti Masyarakat yang tadinya hanya tinggal diam dan pasrah, sekarang melakukan protes kepada perusahaan yang dinilai melakukan pencemaran. Dan tidak hanya sampai disitu masyarakat pun melakukan tuntutan hukum *class actio* bersama dengan lembaga swadaya masyarakat namun sayangnya

taksatupun tuntutan hukum masyarakat dengan ini dimenangkan hakim dengan alasan model tuntutan ini belum ada di Indonesia.

Protes masyarakat dibuktikan dengan salah satu contohnya yaitu adanya unjuk rasa masyarakat sekitar terhadap kehadiran PT Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara. Sebelum perusahaan ini berdiri, masyarakat dapat memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan mencari ikan. Namun, manfaat sungai itu hilang ketika aktivitas perusahaan dilakukan; air sungai menjadi berubah warna dan berbau.

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui undang-undang No.23 Tahun 1997 (Media Akuntansi,1998) pemerintah mencoba memberikan peringatan atas sikap reaktif dari manajemen perusahaan terhadap kepedulian lingkungan salah satunya adalah pencemaran. Karena dengan pencemaran akan menyebabkan kualitas yang rendah dari lingkungan hidup sampai pada tingkat tertentu dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan audit lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28, audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerja dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN TEORI

I. Akuntabilitas Perusahaan Dalam Isu Lingkungan Hidup

Pengertian akuntansi yang pada mulanya dikenal hanya sebagai prosedur pemrosesan data keuangan, berkembang menjadi aktivitas jasa yang diberikan oleh profesi akuntan kepada masyarakat pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengertian tersebut memberikan pesan yang serius tentang adanya dinamisasi ilmu akuntansi yang mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan di sekitarnya seperti tersirat secara implisit dalam PSAK no.1 (revisi 1998) paragraf sembilan :

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting

Tujuan akuntansi lingkungan yaitu untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*. Kegiatan perusahaan dapat diketahui khususnya dalam menangani pencemaran lingkungan serta kewajiban perusahaan atas masalah tersebut melalui laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Selain itu, juga bertujuan memenuhi tuntutan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*). Informasi yang diungkapkan dalam laporan pertanggung jawaban adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk pembersihan lingkungan, fasilitas, atau lahan yang tercemar limbah berbahaya.

Penelitian *The Institute's Survey of Australia*, membuktikan masih adanya gap antara keinginan pihak user dan pengusaha. User menginginkan laporan keuangan tahunan perusahaan menampilkan secara detail tentang kebijakan dan langkah-langkah perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keinginan tersebut tidak disetujui oleh pihak pengusaha, apalagi jika masalah lingkungan hidup dihubungkan dengan penilaian prestasi operasional perusahaan.

Kemungkinan penyebab sedikit pengungkapan sosial oleh entitas karena: (1) periode sebelumnya sudah diungkapkan sehingga tidak usah/perlu mengungkapkan lagi, (2) Tidak perlu diungkapkan item-item tertentu karena dianggapnya hal yang biasa (3) laporan tahunan didesain untuk kepentingan shareholder sehingga informasi yang dibutuhkan stakeholder lain tidak diungkapkan dalam laporan tahunan (Muhammad Muslim Utomo, 2000).

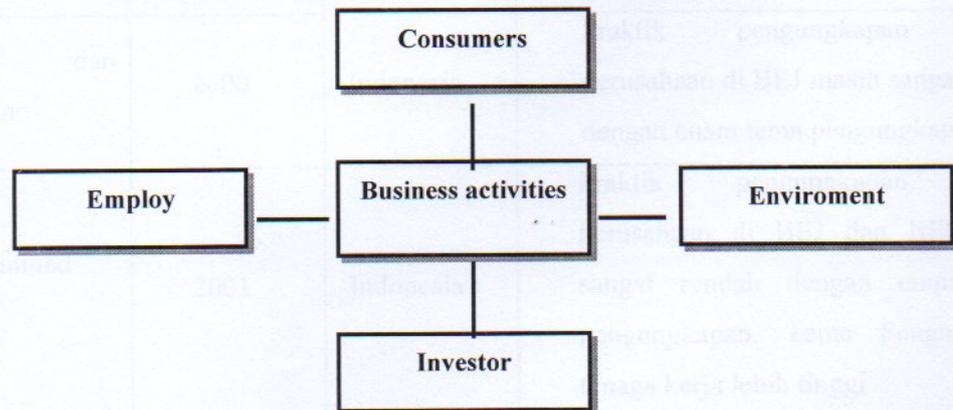
Sehubungan dengan keengganan entitas mengungkapkan tanggungjawab sosialnya khususnya kepedulian terhadap lingkungan, perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat untuk 'memaksa' para pengusaha supaya jujur dan transparan mengungkapkan apa yang telah diperoleh dari lingkungan (alam), sumbangan terhadap alam dan dampak aktivitas terhadap lingkungan (alam). Ditingkat internasional International Standardization Organization (ISO) tahun 1993

mengembangkan standar pengelolaan lingkungan yang dikenal sebagai ISO seri 14000 yang dapat diterapkan pada semua tipe dan skala perusahaan (Felix Jebarus, 1996).

Dalam penyajian pelaporan keuangan menurut Gary et al (1996a) perusahaan harus dapat menilai *substantive environment* yang terdiri atas *primary level*, *secondary level* dan *tertiary level* yaitu: interaksi *medium* perusahaan *manufacturing* dengan lingkungan dan pemegang saham, pemerintah daerah, Bank, dana pensiun dan asuransi, konsumen, karyawan, industri-industri lokal, dll, dimana mereka berhak mendapatkan informasi pertanggungjawaban.

Sedang dari sudut perusahaan mereka mempunyai pengaruh yang langsung dengan keberadaan dan kesuksesan perusahaan interaksi dengan lingkungannya berarti memelihara good will atau legitimasi (Kumalahadi, 2000) *secondary level* menggambarkan interaksi sosial perusahaan yang lebih luas yaitu pengguna infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan karyawan, *advertensi* sampah sisa, teknologi dan sumber-sumber dan *social opportunity cost*. *Tertiary level* menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih kompleks yang menyangkut seperti apa yang kita inginkan, seperti sikap (moral, pendidikan, budaya dan estetika). Pendapat tersebut sesuai dengan Ivancevic (1992) yang digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 1
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Sumber : Ivacevice (1992) Dalam Retno Widowati Purnama Asri (1995)

Berikut ini di sajiakan beberapa hasil penelitan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan yang menunjukan lemahnya kesadaran social perusahaan:

Table 1.

Penelitian Tanggungjawab Perusahaan Di Indonesia

PENELITI	TAHUN	LOKASI	KESIMPULAN STUDI
Bambang Sudibyo	1988	Indonesia	(1) Lemahnya tekanan sosial yang menghendaki pertanggungjawaban sosial perusahaan. (1) Rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya tanggungjawab sosial.
Susanto	1992	Jakarta	Basis perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate disclosure</i> .
Muslim Utomo	2000	Indonesia	Praktik pengungkapan Sosial perusahaan masih sangat rendah dengan tiga tema pengungkapan.
Heny dan Murtano	2000	Indonesia	Praktik pengungkapan Sosial perusahaan di BEJ masih sangat rendah dengan enam tema pengungkapan.
Muhammad Rizal	2001	Indonesia	Praktik pengungkapan Sosial perusahaan di BEJ dan BES masih sangat rendah dengan empat tema pengungkapan. Tema Pengungkapan tenaga kerja lebih tinggi
Azhar Maksun dan Azizul	2003	Medan	Sikap perusahaan saat ini lebih adaptif terhadap lingkungan sosialnya.

Kholis			
Tuti Sriwedari dan Muhammad Rizal	2004	Medan	Tidak terdapat pengaruh antara variabel variabel stake holder terhadap tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di medan

Meskipun tidak ada hubungannya antara akuntan dengan audit lingkungan (Media,1998) namun akuntan yang selama ini menjadi agen lingkungan perusahaan didunia usaha harus ikut peduli terhadap lingkungan hidup Kapan kepedulian tersebut dilakukan? Bila terjadi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dalam tuntutan ganti rugi ,akuntan disini akan diminta jasanya sebagai pihak ketiga yang diperlukan menghitung kerugian akibat aktivitas entitas terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran.kemungkinan .Tugas menghitung kerugian tersebut disebut dengan audit sosial .

Social auditing (Audit Sosial) adalah istilah lain dari akuntansi pertanggung jawaban sosial yang merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang dipopulerkan. Audit sosial mencoba mengenali dampak yang luas dari perusahaan dan organisasi lainnya terhadap aktivitas operasional atas masyarakat (manusia),dan lingkungan hidup . Sifat dampak ini dapat dibuktikan dengan faktor-faktor seperti penggunaan bahan baku yang berbahaya, monopoli kebijakan penentuan harga dan eksternalitas seperti polusi udara dan suara. Seperti dapat dilihat, jangkauan auditing sosial luas dan kurang didefinisikan dengan baik dengan tidak adanya Standar Profesi Akuntan Publik mengenai kepedulian akuntan terhadap lingkungan (Media Akuntansi,1998) dibandingkan jangkauan fungsi audit potensial atau aktual lainnya.

Masalah akuntansi lingkungan di beberapa negara ternyata sudah menjadi perhatian serius. Di Amerika Serikat misalnya, perusahaan besar sudah menerapkan

akuntansi lingkungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu usaha yang ramah lingkungan. Munculnya undang-undang yang menyebabkan adanya akuntansi lingkungan seperti CERCLA, RCRA, dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh negara bagian, sering menyebabkan suatu perusahaan terpaksa menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu sekalipun perusahaan mengalami kesulitan dalam mengestimasi biaya tersebut.

Di Inggris, the Publik Interest Research Council (Badan Penelitian Kepentingan Umum) melakukan sejumlah audit sosial pada awal tahun 70-an, secara mendasar tetapi tidak menyeluruh dengan tujuan pengecekan sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Hasil yang lebih penting dari audit ini menurut Medawar (1976) adalah menguntungkan dalam pengidentifikasian bidang sosial yang tidak bertanggung jawab, dan juga pembuktian bahwa masalah objektivitas dan penilaian seharusnya tidak mengaburkan keuntungan yang dapat diambil dari pengungkapan informasi yang lebih besar dan memungkinkan evaluasi dampak kesejahteraan yang lebih umum dari keputusan yang diambil.

Brooks (1980) melaporkan bentuk audit sosial yang sedikit berbeda dan rendah biaya yang dilaksanakan atas nama Investment Committee of the United Church of Canada. Audit itu terdiri dari survey kuesioner lintas bagian manajemen dan pegawai, dan didasarkan pada premise bahwa penelitian sikap tanggung jawab sosial manajemen dan pegawai akan memberikan gambaran yang lebih tepat untuk aktivitas perusahaan di masa mendatang.

Sebenarnya siapapun harus menjadi agen penyelamat lingkungan tempat hidup kita. Akan tetapi, mungkin dianggap lebih tepat bila akuntan dalam melakukan tugas profesionalnya juga menyertakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, ketika melakukan audit, akuntan perlu mengetahui secara mendetail usaha klien yang diauditnya. Apabila pabrik, dimana lokasinya, apakah perusahaan menyertakan beban biaya terhadap perbaikan lingkungan. Kesulitannya yaitu akuntansi terhadap perhitungan pengrusakan lingkungan belum ada. Yang dapat dilakukan akuntan hanya sebatas negosiasi dengan kliennya, saat pertama kali akan melakukan penugasan. Hal ini dikarenakan adanya instansi yang menangani masalah

lingkungan (AMDAL). Ini berarti, akuntan hanya dibutuhkan untuk menghitung nilai berapa yang rusak akibat dampak pencemaran.

Ada beberapa contoh kasus pengrusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT Inti Indorayon Utama. Tanggapan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut dari gugatan perdata sampai pembakaran bedeng-bedeng pekerja. Kasus-kasus pengaduan pengrusakan lingkungan kebanyakan akhirnya kandas di pengadilan. Pelurusan publikasi PT Freeport Indonesia tahun 1999 di media massa dengan tajuk *Transparansi dan kepedulian lingkungan* yang menimbulkan berbagai tanggapan (Kompas, 16 September 2000).

Mungkinkah ini akibat kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan faktor ekonomis daripada faktor lingkungan. Terbukti dari protes-protes hingga ke gugatan-gugatan yang selalu mentah bahkan tidak dipedulikan. Pemerintah di pusat maupun di daerah terlalu mengharapkan banyak dari hasil yang diperoleh perusahaan sebagai roda ekonomi.

Selama ini yang terjadi di Indonesia, jika perusahaan mendirikan pabrik, harus melakukan hal-hal seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yaitu UU No. 23 Tahun 1997. Audit lingkungan menurut Undang-Undang tersebut adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. UU ini jelas masih mengandung kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik industri sebagai penanggung jawab. Sebaiknya UU yang ada harus dibarengi dengan penyempurnaan ketentuan perundangan yang ada. Dalam kaitan dengan kondisi yang ada, upaya menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan harus terus dilakukan. Bila dalam kenyataannya menghadapi kekuatan birokrasi yang kuat dan ketat, perlu dipikirkan jalan keluar yang lebih terbaik.

II. Peranan Auditor Sosial

Seiring dengan perkembangan isu lingkungan hidup yang dikumandangkan oleh berbagai lembaga pencinta lingkungan, pengungkapan laporan lingkungan hidup pada laporan keuangan perusahaan semakin hari semakin disoroti. Sekalipun demikian, timbul pro dan kontra tentang sejauh mana peran yang dapat dimainkan kalangan akuntan dalam kasus lingkungan hidup ini masih terus diperdebatkan. Kondisi yang demikian, mau tidak mau memaksa akuntan berpikir kembali bagaimana menempatkan posisinya dalam isu lingkungan hidup.

Walaupun tidak ada hubungan akuntan dengan audit lingkungan demikian ungkap pihak Bapedal namun akuntan harus bertanggung jawab dalam isu lingkungan hidup karena selama ini akuntan dikenal sebagai agen lingkungan dunia bisnis. Namun tanggung jawab tersebut tetap harus dalam ruang lingkup keahliannya. Dengan upaya untuk memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup setelah adanya aktivitas dari suatu perusahaan secara benar dan *up to date* kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Sebenarnya akuntansi lingkungan bisa saja dilakukan akuntan dengan terlebih dahulu mempelajari hasil-hasil survei dan analisis lingkungan (AMDAL) yang pernah dilakukan Bapedal maupun survei pemerintah daerah terhadap sosial demografi. Identifikasi terhadap klasifikasi berdasarkan sosial demografi dapat dilakukan sebelum perusahaan mendirikan pabrik. Dengan demikian akuntan memiliki gambaran berapa nilai resiko yang perlu ditanggung perusahaan bila suatu ketika limbah atau polusi yang dihasilkan pabrik bermasalah. Atau dengan kata lain audit lingkungan secara teknis sulit dilakukan oleh akuntan, paling-paling akuntan hanya bisa menganalisis terhadap audit yang dilakukan Bapedal. Dan audit lingkungan tersebut seberapa material akan mempengaruhi laporan keuangan.

III Isu lingkungan hidup

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alam sebagai pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas, hal inilah yang sebenarnya harus di pahami setiap manusia di bumi ini, alam yang di eksploitir manusia hari ini juga merupakan hak

anak cucu kita dimasa yang akan datang, tanggung jawab manusia sebagai individual dan tanggung jawab nya yang berada dalam komonitas apakah itu perusahaan atau negara, adalah manispestasi sosial manusia sebagai makluk zonpolition (makluk sosial) yang berdampingan dengan makluk hidup lainnya.

Tanggungjawab sosila perusahaan akan isu lingkungan sebenarnya bukan merupakan fenomena baru, tetapi menjadi populer di indonesia sejak negara-negara barat menghembuskan isu back to the natural, dan hak azasi diawal tahun1980 (kumalahadi 2000). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang eksplisit dan sulit didevenisikan, karenanya banyak pula pandangan kelompok masyarakat yang memandang hubungan antara masyarakat dengan perusahaan,

Kelompok kapitalis murni yang melihat demokrasi ekonomi liberal tentang bagaimana dunia berlangsung dan suatu cara seharusnya demikian dalam perusahaan swasa para eksekutif adalah karyawan pemilik, yang memepunyai tanggung jawab langsung kepada majikan tanggung jawab tersebut adalah untk menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan majikan, yang secara umum eksekutif harus menghasilkan unag yang sebanyak mungkin dihasilkan yang sesuai dengan aturan dasar masyarakat yang meleka dalam hukum dan kebiasaan etik(friedman 1970).pemegang saham tidak akan memeberikan toleransi tidak akan memberikan toleransi suatu jumlah yang digunakan kegiatan yang bersifat non profit yang dapat mengurangi deviden (Hetherrington,(1973) pandangan bersebelahan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pandangan kontrak sosial (Sethi 1973) berpendapat bahwa seiap intuisi sosial dan bisnis tanpa kecuali beroperasi dalam lingkungan masyarakat melalui kontrak sosial yang mengatakan bahwa suvaivnya suatu usaha karena 1) penyampaian beberapa hasil akhir yang secara sosial diinginkan masyarkat secara umum. 2) distribusi manfaat ekonomi, sosial dan politik kepada kelompok-kelompok agar mendapat kekuatan.

Sosial ecologist adalah mereka yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan lingkungan mempengaruhi sebuah intitas. Dan pandangan ini menurut Goldsmith (1972) upaya untk menghentikan kerusakan-kerusakan yang diakaibatkan

perusahaan merupakan pandangan yang bijaksana , untuk menyelamatkan generasi mendatang, humanis dan melakukan perubahan-perubahan yang terukur.

Sosialis pandangan yang mempercaiyai bahwa dominasi sosial, ekonomi dan politik saat ini oleh modal bertentangan dengan prinsip sosial, sehingga diperlukan readjustment yang signifikan terhadap pemilikan dan struktur masyarakat.

Radical feminis yang memandang bahwa sistem ekonomi, sosial, politik, dan bisnis merupakan construc pria yang menekankan pada agresi, konflik, persaingan dan sebagainya sehingga menolak feminime value seperti keharuan, cita kerjasama dan nilai lainnya. Mereka memandang bahwa tidak ada kebijaksanaan dan cara yang penuh kasih dalam mengelola dunia.

KESIMPULAN

1. Audit Sosial adalah istilah lain dari akuntansi pertanggung jawaban sosial yang merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang mencoba mengenali dampak yang luas dari perusahaan dan organisasi lainnya terhadap bermacam sektor masyarakat, termasuk sektor lingkungan hidup tanpa kepentingan kepemilikan atau keuangan yang langsung.
2. Isu lingkungan hidup merupakan isu yang sudah menjadi bagian integral dari permasalahan bangsa Indonesia, namun masih kurangnya perhatian serius dari pemerintah akibat kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan faktor ekonomis daripada faktor lingkungan . Dan perusahaan juga lebih bersikap reaktif karena besarnya biaya yang diharuskan untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.
3. Peran akuntan dibutuhkan untuk menghitung nilai berapa yang rusak akibat dampak pencemaran dengan terlebih dahulu mempelajari hasil-hasil survei dan analisis lingkungan (AMDAL) yang pernah dilakukan Bapedal maupun survei pemerintah daerah terhadap sosial demografi. Identifikasi terhadap klasifikasi berdasarkan sosial demografi dapat dilakukan sebelum perusahaan mendirikan pabrik.

SARAN – SARAN

1. Upaya menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan harus terus dilakukan, khususnya bagi perusahaan yang menghasilkan aktivitas berkaitan dengan resiko pencemaran lingkungan. Dari dunia bisnis hendaknya kepedulian lingkungan ini jangan dilihat dengan tujuan jangka pendek tapi tujuan jangka panjang sebagai barometernya.
2. Perlunya standar profesi akuntan publik mengenai masalah kepedulian akuntansi terhadap lingkungan sehingga jelas apa yang seharusnya dilakukan akuntan dalam audit lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A and Loebbecks, J.K, *Auditing an Integrated Approach*,. Prentice Hall International, Inc.
- IAI,1996 „Standar Profesional Akuntan publik, Cetakan ketiga. Bagian Penerbit STIE YPKN.
- Felix Jebarus,1996,*Mencari Benang Merah Pembangunan Lingkungan dan Bisnis*,dalam Usahawan No.010/TH.XXV Oktober 1996.
- Kompas,16 September 2000, Meneg LH Klarifikasi hasil audit PT.Freeport.
- Media Akuntansi No.31/Th.V/Desember 1998
- Muhammad Muslim Utomo,2000,dalam SNA III,Jakarta
- Muhammad Rizal, 2001 ” *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Perusahaan Go Publik Di BEJ dan BES*” Tesis universitas Diponegoro, tidak di publikasikan
- Mulyadi, Drs,MSc dan Kanaka Puradiredja,Drs,1998, *Auditing*, Edisi kelima. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tarmizi Achmad, Drs,MBA,Akt, dkk. Materi Kuliah Seminar Auditing : “*Social Audit*”.

Tuti Sri Wedari dan Muhammad Rizal, 2005 "Pengaruh Tekanan Stakeholder terhadap penerapan Akuntansi sosial pada perusahaan manufaktur di Medan", Jurnal telaah Akuntansi, Vol 3 no:2 tahun 2005

YB. Sigit Hutomo, 1996, *Strategi Perusahaan Dalam Menghadapi Isu Lingkungan*, dalam Usahawan No.010/TH.XXV Oktober 1996.

1) Persepsi kerangka yang diajukan untuk diuji adalah berikut:

2) Kerangka tersebut harus diintegrasikan dengan bidang Manajemen Keuangan

3) Naskah yang dimuat dalam Jurnal Aksi Polgan belum pernah dimuat di jurnal lain

4) Naskah Jurnal Aksi Polgan menerima tulisan baik dari para dosen, mahasiswa, praktisi maupun dari pihak lain diluar Politeknik Ganesha Medan

5) Naskah berhak menyunting setiap naskah yang masuk

6) Setiap naskah yang masuk tidak dikembalikan

Kategori Artikel

1) Kategori artikel dapat merupakan:

2) Penelitian empiris, baik yang bersifat empirik maupun studi dokumenter/pemeriksaan lapangan

3) Analisis sekunder

4) Tinjauan buku (book review)

Kelembagaan Naskah

1) Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris dengan menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan disertai dengan abstrak bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia yang ringkas dan padat

2) Jumlah kata naskah antara 5000 - 7500 kata

3) Naskah diketik 2 (dua) spasi, dengan program Microsoft Word

4) Naskah/daftar pustaka ditulis dengan standar baku

Kelembagaan Naskah

1) Naskah diserahkan dalam bentuk print-out dan disket yang memuat naskah tersebut

2) Naskah diserahkan ke Jurnal Aksi Polgan, dengan alamat: Jln. Veteran No. 40-41 Komplek Bina Widyadarmas

Medan, Sumatera Utara 20363. Telp. (061) 77601023 Fax. (061) 77601023

3) Naskah diserahkan ke aksi@politeknikganesha.ac.id atau aksi@politeknikganesha.ac.id